



# JURNAL RISET AKUNTANSI

Volume IV/No.1/April 2012

ISSN : 2086-0447

PENGARUH KOMITMEN MANAJEMEN TERHADAP IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SIDJP) DENGAN PENDEKATAN *BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEM* (BIS) (SURVEY PADA KPP PRATAMA DI WILAYAH KOTA BANDUNG)

**Alfin Ferdiansyah**

**Dadan Kusumawardana**

PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN TINGKAT SUKU BUNGA BI TERHADAP PENDAPATAN MARGIN MURABAHAH PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI

**Astri Arumdhani**

**Rini Septiani**

PENGARUH PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP *ADMINISTRATIVE COST*

**Devi**

**Ipung Priambodo**

PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN FORMAL WAJIB PAJAK (SURVEY WP OP PADA KPP PRATAMA MAJALAYA)

**Egi Andika**

**Ely Suhayati**

**Yohanes Jehadu**

ANALISIS TINGKAT SUKU BUNGA DEPOSITO BANK KONVENSIONAL PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT BAGI HASIL DAN IMPLIKASINYA PADA PENGHIMPUNAN DEPOSITO *MUDHARABAH* PADA BANK SYARIAH MANDIRI

**Rima Rismayanti**

**Wahyu Widodo**

PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA (SURVEY PADA DPRD KOTA BANDUNG)

**Sherillia Septiriane**

**Yon Nusal**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI

**UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA**

JL.Dipatiukur 112-114 Bandung 40132 Telp.022-2504119, Fax. 022-2533754

Email : [ak@unikom.ac.id](mailto:ak@unikom.ac.id)



**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN  
PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK TERHADAP  
AKUNTABILITAS KINERJA  
(Survey Pada DPRD Kota Bandung)**

Oleh :  
**SHERILLIA SEPTIRIANE  
YON NUSDAL**

**UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA**

**ABSTRACT**

*The purpose of research by the author, to determine the effect of Budget Goal Clarity and Application Public Sector Performance Accounting the Performance Accountability in Parliament Office in Bandung. The research method used is descriptive analysis and verification methods with quantitative approaches. The population in this study were all employees of Sub Division of Budget and Finance Council Bandung totaling 20 people. The sample selection is done by using saturation sampling method with a sample of 20 people where the total population is equal to the number of samples. The analysis model used is multiple linear regression analysis. The results of hypothesis testing in this study showed that Clarity Budget Target has a significant positive effect on Performance Accountability means the obvious target for the budget, it is increasingly easy to be accounted for. Implementation of International Public Sector Accounting has a significant positive effect on Performance Accountability means the better implementation of public sector accounting, the more accountable.*

**1. Pendahuluan**

Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Dengan berbagai peraturan perundangan yang telah dikeluarkan tersebut, diharapkan akan terwujud akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas dalam arti sempit dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggungjawab.

Terkait dengan masalah akuntabilitas di Indonesia ada beberapa permasalahan yang berhubungan dengan akuntabilitas kinerja yaitu Kinerja pegawai negeri sipil atau PNS sedang mendapat sorotan karena tingginya biaya negara tidak digunakan dengan baik.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPR RI, Marzuki Alie yang ingin memangkas jumlah PNS di lingkungan gedung MPR DPR karena tidak efektif (Marzuki Alie 2012).

Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah dapat optimal. Perbaikan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diharapkan akan berimplikasi pada minimalnya praktik korupsi sehingga diharapkan *good governance* dapat diwujudkan oleh Pemerintah Indonesia baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah (Urip Santoso, 2008).

Fenomena besar yang terkait dalam sektor publik adalah permasalahan pengadaan barang dan jasa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tidak segan-segan menyatakan, kasus korupsi yang paling banyak dilakukan pejabat pemerintah umumnya dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Pada periode 2004-2010, 44 persen kasus korupsi yang ditangani KPK merupakan kasus pengadaan barang dan jasa. Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Tatang Rustandar Wiraatmaja mengatakan, besarnya alokasi anggaran pengadaan barang dan jasa telah membutuhkan mata pejabat pemerintahan dan oknum PNS. Alokasi anggaran untuk pengadaan barang bisa mencapai 30 persen dari total keseluruhan dana APBN (Tatang Rustandar, 2013).

Berdasarkan Laporan Tahunan 2010 KPK tercatat sejak 2004 terdapat 86 kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Beberapa modus yang marak seperti kasus *mark up*, penunjukan secara langsung pemenang tender, pengadaan proyek yang tidak sungguh-sungguh dibutuhkan, kualitas pekerjaan lebih rendah dari ketentuan dalam spesifikasi teknis, pemberian suap, dan pemalsuan (Danar Supriadi, 2011).

Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat. Proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Menurut Kenis kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang

bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja.

Menurut Menneg PPN/Kepala Bappenas, H. Paskah Suzetta mengakui, para pengelola anggaran belum sepenuhnya dapat melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan. Berbagai bentuk masalah pengelolaan muncul, seperti daya serap anggaran lamban dan ketidaktaatan terhadap aturan formal. Di sisi lain, lambannya daya serap anggaran berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran program dan angka pertumbuhan ekonomi. Misalnya berdasarkan data Direktorat Jenderal [Perbendaharaan](#) yang menggambarkan bahwa ternyata hingga 30 Agustus 2013 lalu, realisasi penyerapan anggaran belanja negara baru mencapai 54,8 persen dari Rp1.726,2 triliun sebagaimana yang ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (ABPN-P) untuk Tahun Anggaran 2013. (Paskah Suzetta, 2011).

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Seberapa besar pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja di DPRD Kota Bandung.
2. Seberapa besar pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja di DPRD Kota Bandung.

## **II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

### **2.1 Kajian Pustaka**

#### **2.2.1 Anggaran**

Anggaran merupakan dokumen/kontrak politik antara pemerintah dan DPRD untuk masa yang akan datang (Mardiasmo, 2009). Kenis dalam Andarias (2009) mengatakan terdapat beberapa karakteristik sistem penganggaran. Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Pada konteks pemerintah

daerah, sasaran anggaran tercakup dalam Rencana Strategik Daerah (Renstrada) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda). Menurut Kenis adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran. Pengertian anggaran menurut Rudianto (2009) adalah “Rencana kerja organisasi di masa mendatang yang mewujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal dan sistematis”.

Pengertian Anggaran menurut Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri (2008:1) adalah :

“Anggaran atau lengkapnya business budget adalah salah satu bentuk dari berbagai rencana yang mungkin disusun, meskipun tidak setiap rencana dapat disebut sebagai anggaran”.

### 2.2.2 Akuntansi Sektor Publik

Pengertian Akuntansi Menurut Azhar Susanto (2008:4) adalah “Akuntansi adalah bahasa bisnis, setiap organisasi menggunakannya sebagai bahasa komunikasi saat berbisnis”.

Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, “Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan”.

Menurut Indra Bastian (2010:3) akuntansi sektor publik dapat didefinisikan:

“Mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta”.

Menurut Dedi Nordiawan (2008) akuntansi sektor publik adalah :

“Proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan”.

Akuntansi Sektor Publik sering disebut Akuntansi Pemerintah, menurut Bahtiar Arif, dkk (2009:11) mendefinisikan akuntansi pemerintah adalah :

“Aktivitas pemberian jasa (*service activity*) untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah kepada para pengguna (*users*) berdasarkan proses

pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas info keuangan tersebut”.

### 2.2.3 Akuntabilitas Kinerja

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan kehendak kita bersama. Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan mendapat dukungan dari publik. Ada kepercayaan masyarakat atas apa yang diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh program yang berorientasi kepada publik. Di pihak penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik.

#### 2.2.3.1 Pengertian Akuntabilitas

Pengertian Akuntabilitas menurut Indra Bastian (2010:385) adalah sebagai berikut :

“Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban”.

Menurut Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah-BPKP adalah:

”Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik”.

#### 2.2.3.2 Pengertian Kinerja

Prawirosentono (2008:2) mengemukakan bahwa kinerja adalah

“Hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika”.



Pengertian kinerja menurut Wirawan (2009:5) adalah "Keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu".

### **2.2.3.3 Pengertian Akuntabilitas Kinerja**

Menurut Maryanto (2007 : 1) pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

"Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodic".

Sedangkan menurut Mahsun (2006 : 83) pengertian Akuntabilitas Kinerja adalah :

"Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodic".

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1 Kejelasan Sasaran Anggaran dengan Akuntabilitas Kinerja**

Anggaran merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik. (Mardiasmo, 2009). Anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada. (Mardiasmo, 2009:63)

Diantara faktor-faktor tentang akuntabilitas beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah antara lain oleh Anjarwati (2012) bertujuan untuk memperoleh bukti empiris secara parsial dan simultan tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Populasi dan sampel dari penelitian ini adalah 51 SKPD diwilayah Tegal dan Pemalang. Subjek dari penelitian ini adalah kepala/pimpinan dari masing-masing SKPD tersebut. Data dalam penelitian ini merupakan data primer. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Variabel independennya adalah kejelasan sasaran anggaran,

pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pertama kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian yang dilakukan Kusumaningrum (2010) ditujukan untuk menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Permasalahan umum dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas aktivitas dan kinerja financial kepada stakeholdernya untuk menciptakan akuntabilitas kinerja. Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain : anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Sampel dalam penelitian ini adalah kepala sub bagian/ kepala sub seksi pada Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 108 orang. Analisis Regresi yang dijalankan dengan perangkat lunak Statistical Product and Service Solution (SPSS) digunakan untuk menganalisis data. Sebelum melakukan uji hipotesis, dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas, kemudian dilakukan uji hipotesis melalui uji F dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### **2.2.2 Penerapan Akuntansi Sektor Publik dengan Akuntabilitas Kinerja**

Penerapan akuntansi sektor publik, memberikan sumbangan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal penyajian informasi pertanggungjawaban mengenai tujuan, fungsi dan obyek pengeluaran. (Bambang Pamungkas, 2012)

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kata kunci bagi terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik. Jadi, tidak salah jika siklus akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses pertanggungjawaban publik. Proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Dewasa ini, akuntabilitas kinerja telah menjadi salah satu item yang tercantum didalam dasar hukum atau aturan organisasi. Karenanya, organisasi



diwajibkan secara hukum untuk memenuhi akuntabilitas organisasinya dengan kinerja yang diperolehnya. Kinerja organisasi dapat diraih dengan mengefektifkan dan mengefisienkan hasil dari proses organisasi, yakni perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit serta pertanggungjawaban publik. (Indra Bastian, 2010:88)

Menurut penelitian Bambang Pamungkas (2012) penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan dan kualitas laporan keuangan pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara parsial maupun simultan. Penerapan akuntansi sektor publik memberikan sumbangan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal penyajian informasi pertanggungjawaban mengenai tujuan, fungsi dan obyek pengeluaran.

### **III OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan sasaran ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk mendapatkan data tertentu. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntansi Sektor Publik dan Akuntabilitas Kinerja.

#### **3.2 Metode Penelitian**

Pengertian metode penelitian menurut Sugiyono (2008:4), menyatakan bahwa metode penelitian adalah sebagai berikut :

“Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah”.

Pengertian penelitian deskriptif yang dikemukakan oleh Umi Narimawati, (2010:29) adalah “Metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”.

Sedangkan pengertian metode verifikatif menurut Mashuri (2008) yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan”.

Sedangkan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian analisis deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian, dan memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain. Dan disertai analisis dan diinterpretasikan berdasarkan teori-teori dan literatur-literatur yang berhubungan dengan kejelasan sasaran anggaran dan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### 3.3 Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini menggunakan tiga variabel agar variabel-variabel penelitian dapat dioperasikan. Sesuai dengan judul penelitian tersebut diatas, maka dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang harus diteliti, yaitu variabel independen (X1 dan X2) sebagai variabel bebas dan variabel dependen (Y) sebagai variabel terikat. Adapun penjelasan untuk setiap variabel

Adalah sebagai berikut :

1. Variabel *Dependen* (Y): Akuntabilitas Kinerja.
2. Variabel *Independen* (X): Kejelasan Sasaran Anggaran dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik.

### 3.4 Sumber Data

Sumber Data primer dan Data Sekunder diperoleh dimana data yang diperoleh penulis merupakan data yang diperoleh secara langsung, dengan mengadakan penelitian dan kuesioner pada Sub Bagian Anggaran dan Keuangan pada Kantor DPRD Kota Bandung dan ada sebagian data atau informasi yang berasal dari media cetak lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Jenis kuesioner ini adalah kuesioner tertutup.

### 3.5 Populasi dan Penarikan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Sub Bagian Anggaran dan Keuangan DPRD Kota Bandung yang berjumlah 20 orang.

## 2. Sampel

Dalam penelitian ini, jumlah sampel yang penulis ambil adalah sebanyak 20 orang dimana jumlah populasi sama dengan jumlah sampel. Hal ini penulis lakukan karena jumlah populasi relatif kecil yaitu kurang dari 30 orang.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan usulan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Studi Lapangan ( *Field Research* )
2. Studi Kepustakaan ( *Library Research* )

### 3.7 Pengujian Alat Ukur Penelitian

#### 3.7.1 Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan menghitung korelasi diantara masing-masing pernyataan dengan skor total. Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang dirancang dalam bentuk kuesioner benar-benar dapat menjalankan fungsinya. Seperti telah dijelaskan bahwa untuk menguji valid tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui nilai koefisien korelasi skor butir pernyataan dengan skor totalnya. Untuk mempercepat dan mempermudah penelitian ini pengujian validitas dilakukan dengan bantuan komputer dengan menggunakan *software SPSS 14.0 for windows*.

#### 3.7.2 Uji Reliabilitas

Setelah melakukan pengujian validitas butir pertanyaan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji reliabilitas untuk menguji kehandalan atau kepercayaan alat pengungkapan dari data. Dengan diperoleh nilai  $r$  dari uji validitas yang menunjukkan hasil indeks korelasi yang menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara dua belahan instrumen. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk uji reliabilitas adalah *Split Half Method (Spearman–Brown Correlation)* Teknik Belah Dua. Metode ini menghitung reliabilitas dengan cara memberikan tes pada sejumlah subyek dan kemudian hasil tes tersebut dibagi menjadi dua bagian yang sama besar (berdasarkan pemilihan genap–ganjil).

### 3.8 Rancangan Analisis dan Pengujian Hipotesis

Peneliti menggunakan analisis kuantitatif untuk melakukan rancangan analisisnya, karena data yang akan diolah adalah data menggunakan statistik. Adapun langkah-langkah analisis kuantitatif yang diuraikan diatas adalah:

#### a. Uji Asumsi Klasik

##### 1. Uji Normalitas

Menurut Imam Ghozali, 2007:110 :

“Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik” Analisis Grafik

Dasar pengambilan keputusan menurut Imam Ghozali, 2007:110 adalah:

- Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- Jika data meyebar jatuh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

##### 2. Uji Multikolinearitas

Menurut Husein Umar (2011:177) “Multikolinieritas adalah untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen”. Jika terdapat Multikolinieritas maka koefisien regresi menjadi tidak tentu, tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan biasanya ditandai dengan nilai koefisien determinasi yang sangat besar, tetapi pada pengujian *pearson* koefisien regresi, tidak ada ataupun kalau ada sangat sedikit sekali koefisien regresi yang signifikan. Pada penelitian ini digunakan nilai *variance inflation factors* (VIF) sebagai indikator ada tidaknya multikolinieritas diantara variabel bebas.

$$VIF = \frac{1}{1 - R_i^2}$$

Sumber: Husein Umar (2011:179)

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Husein Umar (2011:179) mendefinisikan uji heteroskedastisitas adalah dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Cara pengujian untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas juga dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai produksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot.

### 4. Uji Autokorelasi

Menurut Husein Umar (2011:182) “Autokorelasi adalah dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antar data yang ada pada variabel-variabel penelitian”. Pada pengujian autokorelasi digunakan uji *Durbin-Watson* untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada model regresi dan berikut nilai *Durbin-Watson* yang diperoleh melalui hasil estimasi model regresi.

#### b. Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja. Persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

Sumber: Sugiyono (2009:192)

Dimana:

- Y = variabel terikat (*financial distress*)
- $\alpha$  = bilangan konstanta
- $\beta_1, \beta_2$  = koefisien arah garis
- $X_1$  = variabel bebas  $X_1$  (Kejelasan Sasaran Anggaran)
- $X_2$  = variabel bebas  $X_2$  (Penerapan Akuntansi Sektor Publik)

### 1. Analisis Korelasi

Menurut Sujana (1989:152) dalam Umi Narimawati (2011:49), pengujian korelasi digunakan untuk mengetahui kuat tidaknya hubungan antara variabel x dan y, dengan menggunakan pendekatan koefisien korelasi *Pearson* dengan rumus:

$$r = \frac{n(\sum XiYi) - (\sum Xi)(\sum Yi)}{\sqrt{\{n(\sum Xi^2) - (\sum Xi)^2\}\{n(\sum Yi^2) - (\sum Yi)^2\}}}$$

Sumber: Sujana (1989:152) dalam Umi Narimawati (2011:49)

Langkah-langkah perhitungan uji statistik dengan menggunakan analisis korelasi dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Koefisien Korelasi Parsial

Koefisien korelasi parsial antara  $X_1$  terhadap  $Y$ , bila  $X_2$  dianggap konstan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$rx_1y = \frac{rx_1y - rx_2y \cdot rx_1x_2}{\sqrt{[1 - rx_2y^2][1 - rx_1x_2^2]}}$$

Sumber: Sujana (1989:152) dalam Umi Narimawati (2011:49)

b. Koefisien Korelasi Parsial

Koefisien korelasi parsial antara  $X_2$  terhadap  $Y$ , bila  $X_1$  dianggap konstan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$rx_2y = \frac{rx_2y - rx_1y \cdot rx_1x_2}{\sqrt{[1 - rx_1y^2][1 - rx_1x_2^2]}}$$

Sumber: Sujana (1989:152) dalam Umi Narimawati (2011:49)

c. Koefisien Korelasi Secara Simultan

Koefisien korelasi simultan antara  $X_1$  dan  $X_2$  terhadap  $Y$  dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$r_{12y} = \sqrt{\frac{ry_1^2 + ry_2^2 - 2ry_1 \cdot ry_2 \cdot r_{12}}{(1 - r_{12}^2)}}$$

Sumber: Sujana (1989:152) dalam Umi Narimawati (2011:49)

Besarnya koefisien korelasi adalah  $-1 \leq r \leq 1$  :

- a) Apabila (-) berarti terdapat hubungan negatif.
- b) Apabila (+) berarti terdapat hubungan positif.

Interpretasi dari nilai koefisien korelasi :

- a) Kalau  $r = -1$  atau mendekati  $-1$ , maka hubungan antara kedua variabel kuat dan mempunyai hubungan yang berlawanan (jika  $X$  naik maka  $Y$  turun atau sebaliknya).
- b) Kalau  $r = +1$  atau mendekati  $+1$ , maka hubungan yang kuat antara variabel  $X$  dan variabel  $Y$  dan hubungannya searah.

## 2. Koefisiensi Determinasi

Analisis Koefisiensi Determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase. Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

**Sumber: Andi Supangat (2007:341)**

Dimana:

KD = Seberapa jauh perubahan variabel Y dipergunakan oleh variabel X  
 $r^2$  = kuadrat koefisien korelasi

### 3.10 Pengujian Hipotesis

#### 1. Pengujian Secara Parsial

Melakukan uji-t, untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat hipotesis sebagai berikut :

##### a. Rumus uji t yang digunakan adalah:

$$t = \frac{P_{YX1}}{\sqrt{\frac{(1-R^2_{XY \dots Xk})CRit}{(n-k-1)}}} \quad I = 1,2,3 \dots$$

Umi Narimawati (2010:53)

##### b. Hipotesis

$H_0$  ;  $\rho = 0$ , Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja.

$H_a$  ;  $\rho \neq 0$ , Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja.

$H_0$  ;  $\rho = 0$ , Penerapan Akuntansi Sektor Publik tidak berpengaruh pada Akuntabilitas Kinerja.

$H_c$  ;  $\rho \neq 0$ , Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh pada Akuntabilitas Kinerja

##### c. Kriteria Pengujian

$H_0$  ditolak apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $\alpha = 0,05$ )

Kriteria Penarikan Pengujian:

Jika menggunakan tingkat kekeliruan ( $= 0,01$ ) untuk diuji dua pihak, maka kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis yaitu sebagai berikut:

- Jika  $t_{hitung} \geq t_{tabel}$  maka  $H_0$  ada di daerah penolakan, berarti  $H_a$  diterima artinya antara variabel X dan variabel Y ada hubungannya.
- Jika  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$  maka  $H_0$  ada di daerah penerimaan, berarti  $H_a$  ditolak artinya antara variabel X dan variabel Y tidak ada hubungannya.
- Jika  $t_{hitung} \geq t_{tabel}$  maka  $H_0$  ada di daerah penolakan, berarti  $H_a$  diterima artinya antara variabel Y dan variabel Z ada hubungannya
- Jika  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$  maka  $H_0$  ada di daerah penerimaan, berarti  $H_a$  ditolak artinya antara variabel Y dan variabel Z tidak ada hubungannya.



## 2. Pengujian Secara Simultan/Total

Melakukan uji F untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.

### a. Rumus uji F yang digunakan adalah:

$$F = \frac{(n-k-1)R^2_{YX..}}{k(R^2_{YX...})}$$

Umi Narimawati (2010:51)

Pengujian ini dilakukan menggunakan distribusi F dengan membandingkan antara nilai F – kritis dengan nilai F-test yang terdapat pada Tabel Analisis of Variance (ANOVA) dari hasil perhitungan dengan micro-soft. Jika nilai  $F_{hitung} > F_{kritis}$ , maka  $H_0$  yang menyatakan bahwa variasi perubahan nilai variabel (Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntansi Sektor Publik) tidak dapat menjelaskan perubahan nilai variabel terikat (Akuntabilitas Kinerja) ditolak dan sebaliknya.

### b. Hipotesis

$H_0$  ;  $\rho = 0$ , Secara simultan Kejelasan Sasaran Anggaran dan Penerapan Akuntabilitas Sektor Publik tidak berpengaruh pada Akuntabilitas Kinerja.

$H_a$  ;  $\rho \neq 0$ , Secara simultan Kejelasan Sasaran Anggaran dan Penerapan Akuntabilitas Keuangan berpengaruh pada Akuntabilitas Kinerja.

### c. Kriteria Pengujian

$H_0$  ditolak apabila  $T_{hitung} > F_{tabel}$  (  $\alpha = 0,05$  )

### d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil pengolahan data dan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan berdasarkan pada hasil kriteria yang telah dijelaskan diatas, juga dari teori-teori yang mendukung.

#### **IV. HASIL PENELITIAN**

##### **4.1 Hasil Penelitian Analisis Deskriptif**

###### **1. Kejelasan Sasaran anggaran**

Kejelasan sasaran anggaran diketahui jumlah skor aktual yang diperoleh adalah sebesar 433 dengan skor ideal sebesar 600,00 sehingga diperoleh nilai persentase sebesar 72,17%. Nilai persentase total skor dari variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar 433 berada di antara interval 408 – 504 atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran berada dalam kategori baik.

###### **2. Penerapan Akuntansi Sektor Publik**

Penerapan akuntansi sektor publik diketahui jumlah skor aktual yang diperoleh adalah sebesar 938 dengan skor ideal sebesar 1400, sehingga diperoleh nilai persentase sebesar 67%. Menurut Umi Narimawati (2007:85) nilai persentase tersebut termasuk dalam kategori cukup berada pada interval “52.01% – 68.00% “ atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pegawai yang bekerja pada Kantor DPRD Kota Bandung menerapkan akuntansi sektor publik yang cukup.

###### **3. Akuntabilitas Kinerja**

Akuntabilitas kinerja diketahui jumlah skor aktual yang diperoleh adalah sebesar 385 dengan skor ideal sebesar 600, sehingga diperoleh nilai persentase sebesar 64.71%. Menurut Umi Narimawati (2007:85) nilai persentase tersebut termasuk dalam kategori cukup berada pada interval “52.01% – 68.00% “ atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pegawai yang bekerja pada Kantor DPRD Kota Bandung memiliki kriteria yang cukup.

##### **4.2 Analisis Verifikatif**

###### **a. Uji Asumsi Klasik**

###### **1. Pengujian Normalitas**

Dalam regresi linear disturbance error atau variabel gangguan ( $e_i$ ) berdistribusi secara normal atau acak untuk setiap nilai  $X_i$ , mengikuti distribusi normal disekitar rata-rata.

## 2. Pengujian Multikolinieritas

Nilai *tolerance* dan *variance inflation factors* (VIF) dengan kriteria pengujian apabila nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi linier berganda tidak ditemukan multikolinearitas antar variabel bebasnya. Berdasarkan tabel 4.25 di atas menunjukkan bahwa kedua variabel bebas memiliki nilai *tolerance* (0,967) yang lebih besar dari 0,10 dengan nilai VIF (1,034) kurang dari 10. Dari hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa model regresi linier berganda yang akan dibentuk terbebas dari multikolinearitas, sehingga model memenuhi salah satu syarat untuk dilakukan pengujian regresi linier berganda.

## 3. Pengujian Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas, tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

## 4. Uji Autokorelasi

Nilai *d* sebesar 1,951. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai  $d_L$  dan  $d_U$  pada tabel Durbin-Watson. Untuk  $\alpha=0.05$ ,  $k=2$  dan  $n=20$  diperoleh  $d_L= 1,1044$  dan  $d_U= 1,5367$ . Nilai  $d > d_L$ , maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tersebut tidak terdapat autokorelasi.

### b. Analisis Regresi Berganda

Hasil analisis regresi linier berganda diatas diperoleh nilai *constant* sebesar 3,524. Nilai koefisien arah garis ( $b_1$ ) untuk  $X_1$  sebesar 0,252, nilai koefisien arah garis ( $b_2$ ) untuk  $X_2$  sebesar 0,329. Maka persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = 3,524 + 0,252 (X_1) + 0,329 (X_2)$$

### 4.2.1 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda, koefisien regresi kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,252, artinya jika kejelasan sasaran anggaran mengalami perubahan nilainya 1 dan penerapan akuntansi sektor publik mengalami perubahan nilainya 0 maka akuntabilitas kinerja akan mengalami peningkatan sebesar  $Y = 3,524 + 0,252(1) + 0,329(0) = 3,776$ .

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan maka nilai koefisien korelasi yang diperoleh antara kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja adalah sebesar 0,607 dan termasuk dalam kategori hubungan yang kuat berada pada interval “0,600 - 0,799”, artinya semakin jelas sasaran anggarannya maka semakin mudah untuk mempertanggungjawabkannya.

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi kejelasan sasaran anggaran memberikan pengaruh sebesar 32,1% terhadap akuntabilitas kinerja sedangkan sisanya sebesar 67,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan pengawasan.

Hasil dari pengujian nilai  $t_{hitung}$  yang diperoleh variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar 3,187 lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  (2,1) dan berada didaerah penolakan  $H_0$ , sehingga sesuai dengan kriteria pengujian adalah menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ . Artinya bahwa secara parsial kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja

Hal ini menjawab fenomena yang terjadi bahwa pengelolaan anggaran belum sepenuhnya dapat melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan. Seperti daya serap anggaran lamban dan ketidaktaatan terhadap aturan formal.

#### **4.2.1 Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja**

Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda, koefisien regresi penerapan akuntansi sektor publik sebesar 0,329, artinya jika penerapan akuntansi sektor publik mengalami perubahan nilainya 1 dan kejelasan sasaran anggaran mengalami perubahan nilainya 0 maka akuntabilitas kinerja akan mengalami peningkatan sebesar  $Y = 3,524 + 0,252(0) + 0,329(1) = 3,943$

Koefisien korelasi yang diperoleh antara penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja adalah 0,526. Jika diinterpretasikan menurut kriteria dalam Sugiyono (2010) maka artinya korelasi penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja adalah cukup kuat karena berkisar antara 0,40-0,599, artinya semakin baik penerapan akuntansi pemerintahnya maka kinerjanya semakin dapat dipertanggungjawabkan.

Koefisien determinasi penerapan akuntansi sektor publik memberikan pengaruh sebesar 26,1% terhadap akuntabilitas kinerja sedangkan sisanya sebesar 73,9% merupakan kontribusi dari faktor lain yang tidak diteliti. Semakin baik penerapan akuntansi sektor publiknya maka kinerjanya semakin dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil dari pengujian nilai  $t_{hitung}$  yang diperoleh variabel penerapan akuntansi sektor publik sebesar 2,590 lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  (2,1) dan berada didaerah penolakan  $H_0$ , sehingga sesuai dengan kriteria pengujian adalah menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ . Artinya bahwa secara parsial penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja

Hal ini menjawab fenomena yang terjadi bahwa banyaknya kasus korupsi yang tidak berhasil diungkap Kantor DPRD Kota Bandung. Berdasarkan laporan KPK tercatat sejak tahun 2004 terdapat 86 kasus korupsi pengadaan barang dan jasa beberapa modus yang marak seperti kasus mark-up, pemberian suap dan pemalsuan.

#### **4.2.2 Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja**

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan maka nilai koefisien korelasi yang diperoleh antara penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja adalah 0,526. Jika diinterpretasikan menurut kriteria dalam Sugiyono (2010) maka artinya korelasi penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja adalah cukup kuat karena berkisar antara 0,40-0,599, artinya semakin baik penerapan akuntansi pemerintahnya maka kinerjanya semakin dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi penerapan akuntansi sektor publik memberikan pengaruh sebesar 26,1% terhadap akuntabilitas kinerja sedangkan sisanya sebesar 73,9% merupakan kontribusi dari faktor lain yang tidak diteliti seperti pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan pengawasan. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik penerapan akuntansi sektor publiknya maka kinerjanya semakin dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil dari pengujian nilai  $t_{hitung}$  yang diperoleh variabel penerapan akuntansi sektor publik sebesar 2,590 lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  (2,1) dan berada didaerah penolakan  $H_0$ , sehingga sesuai dengan kriteria pengujian adalah menolak  $H_0$  dan

menerima Ha. Artinya bahwa secara parsial penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dari pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa:

1. Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada pada Kantor DPRD Kota Bandung. Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki hubungan yang kuat terhadap akuntabilitas kinerja. Hal tersebut menunjukkan ketika semakin jelas sasaran anggarannya maka semakin mudah untuk mempertanggungjawabkannya. Masalah pada akuntabilitas kinerja terjadi karena kejelasan sasaran anggaran yang belum pasti.
2. Penerapan Akuntansi Sektor publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja pada DPRD Kota Bandung. Penerapan Akuntansi Sektor Publik memiliki hubungan yang cukup kuat terhadap akuntabilitas kinerja. Hal tersebut menunjukkan ketika semakin baik penerapan akuntansi sektor publiknya maka kinerjanya semakin dapat dipertanggungjawabkan. Masalah pada akuntabilitas kinerja terjadi karena penerapan akuntansi sektor publik belum berjalan dengan baik.

### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis mengajukan saran-saran pada Kantor DPRD Kota Bandung sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyajian secara jujur dengan mencatat dan menulis transaksi yang terjadi harus dicatat sepenuhnya sesuai dengan fakta dan penggunaan dana yang diatur secara efektif dan efisien sehingga output yang dihasilkan kedepannya tidak disalah gunakan.
2. Perlu didukung unsur pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan proyek. Karena lemahnya manajemen pengadaan barang dan jasa tersebut berdampak terhadap kualitas pelaksanaan proyek, berupa penundaan

kegiatan atau pencairan dana sehingga program yang diharapkan masyarakat turut tertunda. Agar terciptanya laporan keuangan pemerintah daerah yang bebas dari salah uji material sebaiknya internal auditor harus dituntut secara profesional dalam memperbaiki standar kualitas pelaporan hasil pemeriksaan dan evaluasi hasil pemeriksaan dan sebaiknya perlu didukung unsur pengawasan atau perlu ditambahkan aparat pemda yang berkualitas dan kompeten sehingga akan meningkatkan pelaksanaan audit. Agar menciptakan pertanggungjawaban kepada publik yang baik, perlu mengutamakan pelayanan publik. Untuk itu pemerintah haruslah tanggap dalam merespon serta menyikapi kebutuhan publik.

3. Perlu mengembangkan SDM (PNS) yang profesional dan berkompetensi dengan pembinaan karir PNS yang dilaksanakan atas dasar perpaduan antara sistem prestasi kerja dan karir, maka akan tercipta kinerja yang baik. Pengembangan SDM berbasis kompetensi merupakan suatu keharusan agar organisasi dapat mewujudkan kinerja yang lebih efisien dan memberikan pelayanan publik yang terbaik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aap, A.2010. *Pengaruh Kejelasan Sasaran dan Pengendalian akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten*. Artikel Penelitian
- Andi Supangat. 2008. *Statistika Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi dan Parametrik*. Jakarta: Kencana Prenada
- Arifiyadi, Teguh. 2008. *Konsep tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia Pusat Data Depkominfo*
- Bahtiar Arif, 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Penerbit: Akademia
- Bambang Pamungkas, 2012. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Volume 12 No.2
- Deddi Nordiawan, 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba empat
- Harsanti, P., Sudaryati, D., & Hilmia, N. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus*. ISSN: 1979-6889.
- [http://www.bappenas.go.id/files/7113/5230/0985/minimalkan-akrobat-anggaran-dengan-pengawasan-efektif\\_\\_20081123212415\\_\\_1306\\_\\_0.pdf](http://www.bappenas.go.id/files/7113/5230/0985/minimalkan-akrobat-anggaran-dengan-pengawasan-efektif__20081123212415__1306__0.pdf)
- <http://www.dprdbandungkota.go.id/attachments/article/449/BAB%20I%20Pendahuluan.pdf>
- <http://dprd.jabarprov.go.id/?m=seputar&t=news&id=1170>
- <http://m.merdeka.com/uang/pengadaan-barangjasa-juara-kasus-korupsi-yang-ditangani-kpk.html>



- <http://nasional.kontan.co.id/news/alokasi-dana-bansos-15-kementrian-melanggar-aturan>
- <http://www.pikiran-rakyat.com/node/186848>
- [http://a-research.upi.edu/operator/upload/s\\_l0151\\_0607783\\_chapter1.pdf](http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_l0151_0607783_chapter1.pdf)
- <http://prasetya.ub.ac.id/berita/Bahas-Korupsi-Mahasiswa-FH-Juara-LKTM-Nasional-5308-id.htm>
- <http://sulsel.kemenkumham.go.id/berita/berita-utama/506-semiloka-penyempurnaan-pola-karir-pns-kemenkumham>
- <http://www.tempo.co/read/news/2007/03/13/05595402/Pendidikan-Pegawai-yang-Rendah-Hambat-Kinerja-Pemerintah>
- [http://www.voaindonesia.com/content/icw\\_perbaiki\\_kerja\\_pns\\_dan\\_birokrasi/370607.html](http://www.voaindonesia.com/content/icw_perbaiki_kerja_pns_dan_birokrasi/370607.html)
- Indra Bastian, 2010. *Akuntansi Sektor Publik Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta. Penerbit: Erlangga
- Inspektorat LIPI. 2009. *Pedoman Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*
- Kusumaningrum, Indraswari. 2010. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*. Tesis. Universitas Diponegoro: Program Pascasarjana.
- Lembaga Administrasi Negara, 2003. *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: Penerbit
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Penerbit: Andi
- Mei Anjarwati, 2012. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. ISSN: 2252-6765
- M.Nafarin, 2009. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta. Penerbit: Salemba4
- Netty Herawati, 2011. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi*. ISSN: 0852-8349
- Nita Garnita, 2008. *Skripsi Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Pasal 15 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial*
- Pasal 3 PP No. 39 Tahun 2012 tentang *Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*
- Peraturan Presiden (Perpres) No 54 Tahun 2010, tentang *Pengadaan Barang dan Jasa*.
- Restu Agusti. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Senjangan Anggaran dengan Dimoderasi oleh Variabel Komitmen dan Organisasi dan Informasi Asimetri*.
- Reynaldi Riantiarno & Nur Azlina, 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja*. Vol.3, No.3, November 2011: 560-568
- Rudianto, 2009. *Penganggaran*. Jakarta. Penerbit: Erlangga
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarno Agus Nusantara dan Heru Subiyantoro. *Efektivitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Tasikmalaya*

- Umi Narimawati, Sri Dewi Anggadini, Linna Ismawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: GENESIS.
- Urip Santoso, 2008. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud*. ISSN: 0216-1249
- UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*
- UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

ISSN 2086-0447

